**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUNGKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN NIAS SELATAN**

**ABSTRAK**

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi tentang analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis rasio dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2017. Hasil yang di dapatkan menunjukan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Nias Selatan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah tahun 2011-2017 dilihat dari rasio kemandirian keuangan sangat kurang mampu dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena berada pada kriteri ≤10%. Rasio ketergantungan keuangan daerah sangat kurang mampu karena berada pada kriteria ≤10%. Rasio derajar desentralisasi fisikal sangat kurang mampu karena berada pada kriteria ≤10%. Rasio efektivitas keuangan cukup efektif karena berada pada kriteria ≤90%. Dan rasio efesiensi keuangan daerah sangat tidak efesien karena berada pada kriteria diatas 100%.

**Kata Kunci: *Keuangan Daerah, Otonomi Daerah Dan Analisis Rasio Keuangan***

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang yang terus melakukan pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional itu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur maka seluruh potensi dan sumber daya yang ada harus di alokasikan secara efektif dan efesien demi

mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan undang-undang No 20 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan tonggak dimulainya otonomi daerah.

Sejak berlakunya undang-undang No 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, banyak aspek positif dalam pemberlakuan undang-undang tersebut. Otonomi daerah dapat membawah perubahan positif dalam hal kewenangan daerah dalam mengatur daerah sendiri. Kewenangan ini merupakan sebuah impian masyarakat, karena selama sistem pemerintah yang sentralisasi cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah termasuk masyarakat, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut, keuangan daerah adalah “ semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat di jadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Setiap Kabupaten yang diberikan otonomi diharapkan mampu mengelolah keuangannya sendiri, guna mencapai tujuan dibentuknya otonomi daerah (OTODA) serta menggali PAD sesuai Undang-Undang yang berlaku supaya setiap daerah tidak bergantung pada dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 salah satu Kabupaten yang diberikan Otonomi Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humban Hasundutan. Dengan pemberian Otonomi ini, pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan mempunyai tanggungjawab penuh dalam mengurus dan mengatur daerahnya sendiri serta memiliki hak untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Nias Selatan harus mampu mengelolah sumber-sumber keuangan daeranya sendiri. Untuk lebih jelas, berikut disajikan data rincian pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2011-2017?

**Tabel 1.1**

**Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan**

**Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011-2017 (ribu rupiah)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | PAD | Dana Perimbangan | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah |
| 2011 | 23.030.719,00 | 399.717.262,00 | 68.706.079,00 |
| 2012 | 15.592.080,00 | 471.770.753,00 | 50.733.707,00 |
| 2013 | 32.087.688,00 | 550.041.053,00 | 44.448.567,00 |
| 2014 | 12.828.005,00 | 585.343.366,00 | 44.978.036,00 |
| 2015 | 15.037.043,00 | 629.933.510,00 | 169.924.679,00 |
| 2016 | 16.263.068,00 | 712.606.956,00 | 276.017.186,00 |
| 2017 | 18.450.267,00 | 768.617.878,00 | 339.495.324,00 |

Sumber: BPKPAD kab. Nisel 2019

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim sehingga Kabupaten Nias selatan masih bergantung pada Dana Perimbangan. Pada Tahun 2011-2012 PAD Kabupaten Nias Selatanmengalami penurunan sebesar 7.438.639 dimana pada tahun 2011 PAD nya sebesar 23.030.719,00 dan pada tahun 2012 PAD sebesar 15.592.080, tetapi pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan PAD yang mana besarnya adalah 32.087.688 dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2014 sebesar 12.828.005, pada tahun 2015 sebesar 15.037.043, pada tahun 2016 sebesar 16.263.086 dan pada tahun 2017 sebesar 18.450.267. Jadi PAD kabupaten nias selatan berfluktuasi.

Tetapi dibandingkan dengan dana perimbangan bahwa setiap tahunya mengalami pertumbuhan dan peningkatan dimana pada tahun 2011 sebesar 399.717.262 dan sampai pada tahun 2017 sebesar 768.617.878. Sedangkan lain lain pendapatan yang sah memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan PAD yang mana pertumbuhanya juga setiap tahunya meningkat.Jadi, berdasarkan data diatas bahwa Kabupaten Nias Selatan memiliki pendapatan asli daerah yang masih kecil.

Berdasarkan latarbelakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Selatan dan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Selatan.

**TINJAUAN LITERATUR**

**Konsep Otonomi Daerah**

Menurut Halim (2004:143), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal senada dikatakan Widjaja (2011:76) “otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Jadi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan inisiatif, aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

**Konsep Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamya segala bentuk kekeyaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 205 dalam Abdul Halim, 2007). Sedangkan menurut Widjaja (2011:147) mengemukakan bahwa “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD’’.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa keuangan daerah adalah segala bentuk hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang atau barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah sepanjang tidak melanggar ketentuan peratuaran perundang-udangan.

**Kerangka Teoritis**

**Hubungan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah**

Menurut Halim (2012) mengatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Ini berarti daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan optimal untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus diupayakan seminimal mungkin. Artinya bahwa keuangan daerah merupakan pondasi atau dasar dari tercapainya pembangunan daerah otonomi yang lebih berdaya saing dan berpotensi.

Menurut Yuliati (2016:3) mengatakan bahwa “peranan keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa daerah yang diberikan kewenangan otonomi harus mampu mengelolah keuangannya sebagai perwujudan tercapainya tujuan pembentukkan daerah otonomi. Kemampuan keuangan yang dimaksud adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai rencanan progaram pemerintah tanpa bergantung pada bantuan dana dari provinsi mapuan dana dari pusat.

**Sumber-Sumber Keuangan Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 ”Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah”. Sedangkan menurut Widjaja (2011:110) mengemukakkan bahwa sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimanan yang sah

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Halim (2004) membedakan 2 faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, yaitu factor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk. Sedangkan factor internalnya yaitu sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, system dan pelaporan. Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa factor faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu factor ekstenal dan faktor internal. Dimana factor internal meliputi sarana dan prasaran, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan sumber daya manusia, peraturan daerah, system dan pelaporan. Sedangkan faktor eksternal yaitu investasi, PDRB inflasi, dan jumlah penduduk.

**Tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah**

menurut widjaja (2011:76) tujuan dari otonomi daerah ini adalah “ menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan”. Hal senada juga dikemukakkan oleh Halim (2014:25) mengatakan bahwa tujuan otonomi daerah terbagi dua kepentingan yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan perwujudan demokrasi sistem pemerintah di daerah. Sedangkan dari kepentingan pemerintahan daerah tujuannya yaitu:

1. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik lokal/daerah,
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan memperhatikan hak-hak masyarakat,
3. Untuk mewujudkan lokal *responsivenes* yang artinya mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial.

**Penelitian Terdahulu**

 Penelitian juga dilakukan Zai (2018) dengan judul “analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, sedangkan alat analisis yang digunakan yaitu rasio tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat ketergantungan daerah, tingkat desentralisasi fisikal, rasio aktivitas, rasio efektivitas dan rasio keserasian. Hasil penelitain yang dilakuakan yaitu bahwa dengan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan bahwa Kabupaten Nias Barat dalam periode 5 tahun memiliki tingkat kemandirian dengan rata-rata 2,81%. Jika dibandingkan dengan tingkat kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Nias Barat sudah sangat baik (skala 0.00%-10,00%) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan tingkat ketergantungan daerah menunjukan bahwa tingkat ketergantungan berada pada rata-rata 53,31%. Jika dibandingkan dengan skala pengukuran maka kabupaten Nias Barat tergolong masih sangat tinggi tingkat ketergantungannya. berdasarkan tingkat desentrallisasi menunjukan bahwa masih tergolong sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,14%. Berdasarkan rasio efektivitas menunjukan bahwa sudah sangat efektif dengan rata-rata 0,93%. Berdasarkan rasio aktivitas, menunjukan bahwa kabupaten Nias Barat menunjukan bahwa perkembangannya positif dengan rata-rata 0.32%. Sedangkan berdasarkan rasio perumbuhan masih belum mampu dan berdasarkan rasio keserasian menunjukan bahwa Kabupaten Nias Barat masih rendah dalam mendukung perkembangan kemampuan daerah.

 Penelitian yang dilakukan oleh Agus (2017) dengan judul “analisis tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah”. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan di kota Pamekasan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentarlisasi , rasio ketergantungan keuangan daerah. Hasil analisisi yang di peroleh yaitu : berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukan dengan angka rasio dengan rata-ratanya adalah 36,53% masih berada diantara 25% - 50% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif. Sedangkan berdasarkan rasio derajat desentralisasi fisikal menunjukan bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kabupaten Pamekasa masih sangat relatif rendah dalam pelaksanaan otonominya yang hanya memiliki rata-rata 6,4%. Sedangkan berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran langsung daerah rata-rata sebesar 19%, ini artinya ketergantungan kabupaten Pamekesan cukup besar karna masih dalam skala interval 10,01-20,00%. Hal ini berarti PAD memiliki ketergantungan cukup besar untuk membiayai pengeluaran langsung dan pemerintah Kabupaten Pamekesan masih tergantung pada sumber penerimaan keuangan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi.

Penelitian juga dilakukan oleh Savitri (2015) dengan judul “analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah tahun 2007-2011 di kota Makasar”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah tahun 2007-2011 di kota Makasar. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2007-2011. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah selama lima tahun terakhir yang menghasilkan jumlah rata-ratanya sebesar 18,30% dengan pola hubungan yang instruktif. Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan angka rata-rata sebesar 15,39% dengan kemampuan keuangan yang tergolong masih kurang. Kemudian berdasarkan Rasio IKK menunjukan bahwa kota makasar masih tergolong belum mampu membiayai belanja rutin pemerintah dengan rata-rata 24,99% dengan pla kemampuan keuangan yang masih berada dalam interval 20,01% - 40,00% yang dinilai masih kurang. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian, pemerintah kota Makasar masih belum memprioritaskan belanja rutin dari pada belanja pembangunan. Hasil rata-rata rasio pembangunan sebesar 37,20% dan rasio belanja rutin sebesar 62,80%. Angka ini menunjukan bahwa pemerintah kota makasar belum memperhatikan pembangunan daerah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Desita (2015) dengan judul “analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di kota Pekan Baru (2010-2014). Tujuan dari peneiltian ini adalah untuk melihat besar kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pekan Baru. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif komparatif. Sedangkan alat analisis yang digunakan yaitu, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fisikal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan keuangan daerah kota pekan baru masih sangat kurang dibuktikan dengan rasio IKK yang memiliki pola instruktif. Selanjutnya berdasarkan rasio derajat desentralisasi fisikal, yang berada pada interval kurang yaitu sebesar 17,68%. Sedangkan berdasarkan rasio IKR yang berada pada skala kurang yaitu dengan rata-rata 37,01% yang berarti pemerintah masih belum mampu membiayai pengeluaran ruti yang di prioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas perangkat daerah Selanjutnya rasio keserasian dapat dikatakan hampir serasi karena kebutuhan belanja rutin dan belanja pembangunan sudah ada keseimbangan yaitu belanja rutin sebesar 47,16% dan belanja pembangunan 40,70%. Dan yang terakhir adalah rasio pertumbuhan, yang mana dapat disimpulkan Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan yang positif.

Penelitian juga dilakukan wurangian (2017) dengan judul “analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Tomohon tahun 2007-2015”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Tomohon. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Alat analisis yang digunakan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fisikal, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari analisis menunjukan bahwa dilihat dari rasiokemandirian keuangan tahun 2007-2015 termasuk dalam pola hubungan instruktif, sedangkan berdasarkan rasio desentralisasi fisikal menunjukan bahwa daerah tomoho memiliki rata-rata skala interval 0,00% - 10%. Yang mana menunjukan bahwa kota Tomoho masih kurang sehingga kota tomoho masih bergantung pada dana perimbangan dari pusat. Berdasarkan rasio pertumbuhan menunjukan bahwa kota tomohon masih sangat kurang dilihat dari PAD yang masih kecil, total penerimaa masih kurang, pembangunan masih juga kurang. Sehingga kota tomohon Masih kurang mampu dalam meninggkatkan pertumbuhan daerahnya.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

**Jenis Dan Sumber Data**

 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mengumpulkan laporan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2011-2017. Laporan keuangan yang di maksud adalah laporan realisasi anggaran (PAD dan laporan realisasi Belanja daerah).

**Metode Analisis Data**

Metode analisis data penelitian ini mengunakan analisiss rasio. Dimana analisis rasio merupakan alat analisis untuk membandingkan kemampuan keuangan suatu daerah. Pada penelitian ini, peneliti mengunakan 5 alat analisis yaitu:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Pendapatan Asli Daerah

 X 100%

Dana Perimbangan

Rasio Kemandirian =

2. Rasio Ketergantungan keuangan daerah

Pendapatan Asli Daerah X 100 %

Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi

Rasio Ketergantungan=

3. Rasio Derajat desentralisasi fisikal

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Total Penerimaan Daerah (TPD)

Derajat Desentralisasi fisikal =

Adapun kriteria untuk menetapakan kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi fisikal, dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentase PAD terhadap Dana Perimbangan | Kemandirian Keuangan Daerah | Kemampuan Keuangan Daerah | Rasio Desentralisasi Fisikal |
| 0,00 – 10.0 | Sangat Kurang | Sangat Kurang | Sangat Kurang |
| 10,1 – 20.0 | Kurang | Kurang | Kurang |
| 20,1 – 30.0 | Sedang | Sedang | Sedang |
| 30,1 – 40.0 | Cukup | Cukup | Cukup |
| 40,1 – 50.0 | Baik  | Baik  | Baik  |
| >50,00 | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |

*Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991*

4. Rasio Efektivitas

Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan

tan

Rasio eferktivitas =

5. Rasio Efesiensi

(Pengeluaran) Belanja

Pendapatan

Rasio Efesien =

 Adapun kriteria untuk menetapakan efesiensi keuangan daerah, dan efektivitas keuangan daerah, dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

**Kriteria Penilaian Efesiensi Pengolaan Keuangan Daerah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Presentase Kinerja Keuangan | Kriteria efektivitas  | Kriteria efesiensi |
| Diatas 100% | Sangat Efektif | Tidak Efesien |
| 90% - 100% | Efektif | Kuran Efisien |
| 80% - 90% | Cukup Efektif | Cukup Efisien |
| 60% -80% | Kurang Efektif | Efesien |
| Kurang dari 60% | Tidak Efektif | Sangat Efesien |

 *Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996*

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Rasio Kemandirian Keuangan daerah**

 Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan menggunakan data-data sekunder yang di peroleh, maka tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**

**Rasio Kemadirian Keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan**

**Tahun 2011-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | PAD | Dana Perimbangan | Rasio | Tingkat Kemandirian |
| 2011 | 23.030.717 | 399.717.262 | 5,762% | Sangat Kurang |
| 2012 | 15.592.079 | 471.770.753 | 3,305% | Sangat Kurang |
| 2013 | 32.087.696 | 550.041.052 | 5,834% | Sangat Kurang |
| 2014 | 12.828.004 | 585.343.364 | 2,192% | Sangat Kurang |
| 2015 | 15.037.041 | 629.933.514 | 2,387% | Sangat Kurang |
| 2016 | 16.263.067 | 712.606.957 | 2,282% | Sangat Kurang |
| 2017 | 18.450.267 | 768.617.877 | 2,400% | Sangat Kurang |
| Rata-rata | 3,452% | Sangat Kurang |

*Sumber: data olahan penulis 2020*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, tentang kemandirian Keuangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2011-2017 penulis membuat kesimpulan bahwa setiap tahunnya rasio kemandirian keuangan daerah berfluktuasi , dengan rata-rata kemandiriannya keuangan Kabupaten Nias Selatan selama tujuh (7) tahun atau periode 2011-2017 memiliki rasio kemandirian sebesar 3,452% dan berdasarkan kriteria kemandirian berada pada pola interval 0,00-10,0 (sangat kurang).

**Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan menggunakan data-data sekunder yang di peroleh, maka tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**

**Rasio Ketergantungan Keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan**

**Tahun 2011-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | PAD | APBD Tanpa subsidi | Rasio | Tingkat ketergantungaa keuangan |
| 2011 | 23.030.719 | 91.718.794 | 25,110% | Sedang |
| 2012 | 15.592.080 | 66.325.786 | 23,508% | Sedang |
| 2013 | 32.087.699 | 76.536.253 | 41,925% | Baik |
| 2014 | 12.828.005 | 57.801.040 | 22,191% | Sedang |
| 2015 | 15.037.043 | 184.961.359 | 8,130% | Sangat Kurang |
| 2016 | 16.263.068 | 292.561.453 | 5,502% | Sangat Kurang |
| 2017 | 18.450.267 | 357.945.591 | 5,154% | Sangat Kurang |
| Rata-rata | 18,789% | Kurang |

*Sumber:* *data olahan penulis 2020*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, tentang rasio ketergantungan Keuangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2011-2017 penulis membuat kesimpulan bahwa setiap tahunnya rasio kemandirian ketergantungan keuangan daerah mengalami penurunan rasio , sehingga memiliki rata-rata ketergantungan keuangan Kabupaten Nias Selatan selama tujuh (7) tahun atau periode 2011-2017 memiliki rasio kemandirian sebesar 3,452% dan berdasarkan kriteria kemandirian berada pada pola interval 0,00-10,0 (sangat kurang).

**Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal**

 Berdasarkan Dari hasil penelitian, dapat dilihat rasio desentalisasi fisikal Kabupaten Nias Selatan pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**

**Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal Kabupaten Nias Selatan**

**Tahun 2011-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | PAD | Total Penerimaan Daerah (TPD) | Rasio | Tingkat Kemampuan keuangan daerah  |
| 2011 | 23.030.717 | 491.426.056 | 4,686% |  Sangat Kurang |
| 2012 | 15.592.079 | 538.096.539 | 2,898% |  Sangat Kurang |
| 2013 | 32.087.686 | 626.577.305 | 5,121% |  Sangat Kurang |
| 2014 | 12.828.004 | 643.149.044 | 1,995% |  Sangat Kurang |
| 2015 | 15.037.041 | 814.894.873 | 1,845% |  Sanagt Kurang |
| 2016 | 16.263.067 | 1.008.168.410 | 1,613% |  Sangat Kurang |
| 2017 | 18.450.267 | 1.126.563.468 | 1,638% |  Sangat Kurang |
| Rata-rata | 2,828% |  Sangat kurang |

 *Sumber: data olahan Penulis 2020*

 Berdasarkan tabel 4.4 tentang rasio desentralisasi fisikal keuangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2011-2017, dapat di ketahui bahwa setiap tahunnya rasio keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuatif yaitu tahun 2011 sebesar 4,688%, 2012 sebesar 2,898%, tahun 2013 sebesar 5,121%, tahun 2014 sebesar 1,995%, tahun 2015 sebesar 1,845%, tahun 2016 sebesar 1,613% dan pada tahun 2017 sebesar 2,898%. Dengan rata-rata rasio desentralisasi fisikal sebesar 5,121% dan berdasarkan kriteria rasio derajat desentrlisai fisikal berada pada pola interval 0,00-10,0 (sangat kurang).

**Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

 Berdasarkan penelitian, rasio efektivitas keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4.5**

**Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan**

**Tahun 2011-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Realisasi Pendapatan | Target Pendapatan | Rasio | Tingkat efektif |
| 2011 | 491.436.056 | 556.912.412 | 88,243% | Cukup efektif |
| 2012 | 538.096.539 | 591.871.356 | 90,914% | Efektif |
| 2013 | 626.577.305 | 782.595.285 | 80,064% | Cukup efektif |
| 2014 | 643.149.404 | 757.449.182 | 84,910% | Cukup efektif |
| 2015 | 814.894.873 | 883.248.764 | 92,261% | Efektif |
| 2016 | 1.008.168.410 | 1.093.581.486 | 92,190% | Efektif |
| 2017 | 1.126.563.468 | 1.235.363.173 | 91,193% | Efektif |
| Rata-rata | 88,539% | Cukup efektif |

*Sumber: data olahan penulis 2020*

Berdasarkan tabel 4.5 tentang rasio efektivitas keuangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2011-2017, dapat di ketahui bahwa setiap tahunnya rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuatif yaitu tahun 2011 sebesar 88,243%, 2012 sebesar 90,914%, tahun 2013 sebesar 80,064%, tahun 2014 sebesar 84,910%, tahun 2015 sebesar 92,261%, tahun 2016 sebesar 92,190% dan pada tahun 2017 sebesar 91,193%. Dengan rata-rata rasio desentralisasi fisikal sebesar 88,539% dan berdasarkan kriteria rasio derajat desentrlisai fisikal berada pada pola interval 80%-90% (cukup efektif).

**Rasio Efesiensi Keuangan daerah**

Rasio efesiensi merupakan pengukuran tingkat seberapa efesiensi pelaksanaan suatu kegiatan dengan membandingkan input yang digunakan dengan autput yang dihasilkan yang memerlukan data realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Berdasarkan penelitian, tingkat efesiensi Kabupaten Nias Selatan di sajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.6**

**Rasio Efesiensi Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan**

**Tahun 2011-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Belanja (pengeluaran) | Pendapatan | Rasio | Tingkat Efesien |
| 2011 | 479.421.887 | 491.436.056 | 97,555% | Kurang Efisien |
| 2012 | 621.171.483 | 538.096.539 | 115,439% | Tidak Efisien |
| 2013 | 669.036.416 | 626.577.305 | 106,776% | Tidak Efisien |
| 2014 | 719.011.173 | 643.149.404 | 111,795% | Tidak Efisien |
| 2015 | 855.251.720 | 814.894.873 | 104,952% | Tidak Efisien |
| 2016 | 810.002.785 | 1.008.168.410 | 80,344% | Cukup Efisien |
| 2017 | 1.074.527.745 | 1.126.563.468 | 95,381% | Kurang Efisien |
| Rata-rata | 101,749% | Tidak Efisien |

*Sumber: data olahan Penulis 2020*

Berdasarkan tabel 4.6 rasio efesiensi keuangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2011-2017, maka penulis membuat kesimpulan bahwa setiap tahunnya rasio efesiensi keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuatif yaitu tahun 2011 sebesar 97,555%, 2012 sebesar 115,439%, tahun 2013 sebesar 106,776%, tahun 2014 sebesar 111,795%, tahun 2015 sebesar 104,952%, tahun 2016 sebesar 80,344% dan pada tahun 2017 sebesar 95,381%. Dengan rata-rata rasio desentralisasi fisikal sebesar 101,749% dan berdasarkan kriteria rasio derajat desentrlisai fisikal berada pada pola interval di atas 100% (tidak efesien).

**Kesimpulan**

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kabupaten Nias Selatan, tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Selatan tahun 2011-2017 bahwa, jika di ukur dari analisis Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketegantang keungan deerah, dan rasio derajat desentralisasi fisikal, menunjukan Kabupaten Nias Selatan selama periode 7 (tujuh) tahun dari tahun 2011-2017 masih kurang mampu dalm mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sedangakan berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah, menunjukan Kabupaten Nias selatan selama periode 2011-2017 memiliki rata-rata 88,539%. Jika dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah berada pada interval 80%-90% yang cukup efektif dalam mendukung pelaksanan otonomi daerah. Begitu juga dengan rasio efesiensi keuangan daerah, menunjukan Kabupaten Nias Selatan selama periode 2011-2017 memiliki rata-rata sebesar 101,749%. Jika dibandingakn dengan kemampuan keuangan daerah berada pada pola interval diatas 100% (tidak efesien) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andarini. 2010. Otonomi Daerah. Jakarta Timur: CV GHINA WALAFAFA

Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. 1991. *Pengukuran Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggungjawab,* Jakarta

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan. *Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2018.* CV New Creative

Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP YKPN*

Halim, Abdul. 2002. *Akutansi sektor Publik.* Jakarta : Salemba Empat

Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Pengolaan Keuangan Daerah*. Penerbit : UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Mahmudi. 2010  *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta : Sekolah Tingggi Ilmu Manajemen YKPN

Kamaroellah, R Agus, 2017. *Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Derah. Jurnal Nuasa.* Vol 14 No 1)

Sanny, Wurangian, 2013. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Tomoho. Jurnal Ilmiah Efesiensi,* Volume 17:64-78)

Savitry, Ermhita. 2011. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonom Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan.* Vol 4;23-34).

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jakarta. Direktorat jenderal otonomi daerah.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. Direktor Jenderal Otonomi Daerah.

Widjaja, 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT GRAFINDO Persada.

Yulianti. 2016. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah.*Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: UPP YKPN

Zai, Nias Tivis. 2018 Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Atonomi Daerah Kabupaten Nias Barat . *Skripsi*: Progaram S-1 STIE Nias Selatan.